

## Presiden Korsel Memulai Kunjungan Kenegeraan ke Belanda

**AMSTERDAM(IM)** - Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol meletakkan karangan bunga di monumen nasional Belanda di Amsterdam.

Ia melakukan tur ke markas besar perusahaan teknologi ASML pada awal kunjungan dua hari yang berfokus pada kerja sama semikonduktor.

Dalam kunjungan kenegeraan ini Yoon bertemu dengan Raja Willem-Alexander dan akan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte.

Ini merupakan kunjungan pertama presiden Korsel sejak kedua negara menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1961.

Penasihat keamanan Yoon, Kim Tae-hyo mengatakan presiden Korsel dan Rutte akan mengumumkan pernyataan bersama untuk meresmikan "aliansi chip" antara kedua negara.

Kim menambahkan dengan aliansi tersebut dua pemain utama di pasar semikonduktor global ini akan bersama-sama merespons krisis dalam rantai pasokan chip. Yoon didampingi delegasi dari produsen chip komputer utama negaranya, Samsung dan SK Hynix. Keduanya adalah pelanggan utama ASML, dan Korsel pasar terbesar kedua ASML berdasarkan penjualan setelah Taiwan.

Dalam pertemuan di kantor pusat ASML, Samsung menandatangani nota kesepahaman dengan perusahaan Belanda tersebut untuk bersama-sama menginvestasikan sekitar 1 triliun won atau 762 juta dolar AS untuk membangun fasilitas penelitian Korea.

Secara terpisah, ASML dan SK Hynix menandatangani perjanjian untuk berkolaborasi dalam mengembangkan teknologi yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan energi dalam pembuatan chip.

Kantor prepresiden Korsel mengatakan ASML sudah membangun jalur perakitan baru di Korea Selatan dengan investasi sebesar 181 juta dolar AS.

Lembaga penelitian Belanda dan Korsel termasuk Universitas Teknik Eindhoven dan Institut Korea untuk Kemajuan Teknologi menandatangani perjanjian tentang pertukaran akademis, bersama dengan menteri perdagangan dari kedua negara.

Korsel dan Belanda menandatangani perjanjian kemitraan strategis di Seoul pada tahun 2022, yang mengakui kepentingan bersama mereka sebagai negara perdagangan "menengah" yang berkomitmen pada aturan hukum internasional. Perjanjian tersebut menyebutkan kedua negara akan mencari cara untuk berkoordinasi antara pemerintah dan sektor swasta "dan untuk bersama-sama melindungi dan mempromosikan teknologi penting dan teknologi baru, termasuk di bidang semikonduktor". ● tom



### PERINGATAN NASIONAL UNTUK KORBAN PEMBANTAIAAN NANJING

Tiongkok mengadakan upacara peringatan nasional bagi para korban pembantaian Nanjing di Aula Peringatan Para Korban Pembantaian Nanjing oleh Penjajah Jepang di Nanjing, Prov. Jiangsu, Tiongkok, Rabu (13/12). Masyarakat Nanjing mengheningkan cipta dan sirene terdengar di seluruh kota untuk berduka atas 300.000 korban pembantaian Nanjing.

## Mayoritas Negara Anggota PBB Dukung Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Kecuali AS

Walaupun resolusi ini tidak mengikat tapi menjadi indikator opini dunia.

**NEW YORK(IM)** - Sebagian besar negara anggota Majelis Umum PBB mendukung resolusi yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza.

Resolusi ini diloloskan dengan 153 suara yang mendukung, 23 abstain, dan 10 menolaknya, Israel dan Amerika Serikat (AS) termasuk negara yang menolak. Walaupun resolusi ini tidak mengikat tapi menjadi indikator opini dunia.

"Kami semua berterima kasih pada mereka yang mendukung penyusunan resolusi yang diadopsi dengan suara mayoritas yang besar, ini mencerminkan posisi interna-

sional untuk menyerukan pengakuan resolusi ini," kata Duta Besar Arab Saudi untuk PBB Abdulaziz Alwasil, seperti dikutip Aljazeera, Rabu (13/12).

Pemungutan suara digelar saat tekanan internasional untuk Israel mengakhiri pembomannya ke Gaza semakin menguat. Serangan-serangan Israel yang sudah berlangsung berbulan-bulan itu sudah menewaskan lebih dari 18 ribu rakyat Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Lebih dari 80 persen dari 2,3 juta warga Gaza terpaksa mengungsi.

Penggunaan dan serangan udara tanpa henti oleh Israel telah menciptakan

"neraka di bumi" --sebutan yang disematkan para pejabat PBB yang datang langsung ke Gaza. Serangan militer Israel sangat membatasi akses makanan, bahan bakar, air dan listrik ke Jalur Gaza.

Pemungutan suara di Majelis Umum dilakukan setelah resolusi Dewan Keamanan PBB yang juga menyerukan gencatan senjata kemanusiaan gagal diloloskan karena veto dari AS. Washington menjadi satu-satunya negara yang tidak setuju gencatan senjata.

Sementara itu, Inggris abstain. Tidak seperti resolusi Majelis Umum PBB, resolusi Dewan Keamanan memiliki kekuatan yang mengikat.

Sebelumnya, resolusi Dewan Keamanan gagal diloloskan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengambil langkah luar biasa dengan

menggunakan Pasal 99 Piagam PBB, yang memungkinkannya untuk mengeluarkan peringatan tentang ancaman serius terhadap perdamaian internasional. Terakhir kali pasal ini digunakan pada tahun 1971.

Namun, pengesahan resolusi Majelis Umum yang tidak mengikat juga menghadapi tentangan dari AS. AS maupun Austria mengajukan amandemen terhadap resolusi tersebut untuk mengutuk serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober yang menandai dimulainya konflik saat ini.

Aljazeera melaporkan negara-negara Arab melihat amandemen-amandemen ini sebagai upaya untuk mempolitisi pemungutan suara. Keduanya gagal untuk diloloskan.

Duta Besar Mesir untuk PBB Osama Abdelkhalik menyebut rancangan resolusi

tersebut "seimbang dan netral", dan menyerukan perlindungan bagi warga sipil dari kedua belah pihak dan pembebasan semua tawanan.

"Utusan Israel untuk PBB Gilad Erdan, mencari seruan gencatan senjata. Ia menyebut PBB sebagai "noda moral" bagi kemanusiaan.

"Waktunya telah tiba untuk meletakkan kesalahan di tempat yang semestinya: di pundak para monster Hamas," katanya.

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden dengan tegas mendukung kampanye militer Israel, dengan alasan hal itu harus dilakukan untuk menghancurkan Hamas.

Namun, ketika pasukan Israel meratakan seluruh wilayah, termasuk sekolah dan rumah sakit, AS semakin berseberangan dengan opini internasional. ● tom

## Jerman Dakwa 27 Orang Terkait Rencana Kudeta

**BERLIN(IM)** - Kejaksaan Jerman mendakwa 27 orang karena mendukung organisasi teroris dan mempersiapkan aksi pengkhianatan tingkat tinggi. Dakwaan ini diberikan setelah anggota kelompok sayap kanan ditangkap atas dugaan merencanakan kudeta pada tahun lalu.

Jaksa federal Jerman mengatakan kelompok Reichsbuenger (Warga Reich) yang tidak mengakui pemerintahan Jerman modern ingin membentuk negara baru yang dipimpin aristokrat Heinrich XIII Prinz Reuss.

Jaksa mengatakan asosiasi itu berencana mengirimkan sekelompok orang bersenjata untuk masuk ke parlemen di Berlin, menyandera anggota parlemen dan menggulingkan sistem. Jaksa menambahkan untuk meraih tujuannya kelompok ini merekrut personel militer, membeli peralatan dan mengambil alih tempat latihan menembak.

"Para anggota menyadari rencana pengambilalihan kekuasaan akan melibatkan pembunuhan orang-orang," kata para jaksa penuntut dalam pernyataan yang menguraikan dakwaan yang diajukan pada Selasa (12/12/).

Kelompok ini ingin membangun angkatan bersenjata di seluruh negeri dan memiliki sinyal "Hari H" untuk

memulai aksinya. Mereka juga menyusun daftar musuh-musuhnya.

Jaksa mengatakan dengan sumber keuangan senilai setengah miliar euro, mereka juga memiliki "persenjataan yang besar." Termasuk 380 senjata api, hampir 350 senjata yang dapat digunakan untuk menikam orang dan hampir 500 senjata lainnya ditambah 148 ribu amunisi.

Jaksa menambahkan anggota kelompok ini juga membeli peralatan seperti helm balistik, rompi anti peluru, kamata inframerah, dan borgol. "Anggota organisasi ini bersatu oleh penolakan mendalam institusi negara dan tatanan demokrasi yang bebas," kata jaksa federal dalam pernyataannya.

Mereka mengatakan anggota kelompok itu mencampurkan mitos-mitos konspirasi termasuk narasi dari ideologi QAnon. Mereka sangat yakin saat ini Jerman dikuasai anggota yang mereka sebut "deep state."

Sesuai dengan peraturan privasi Jerman, para jaksa penuntut tidak menyebutkan nama lengkap para tertuduh.

Kasus-kasus tersebut akan dikirim ke pengadilan di Frankfurt, Munich dan Stuttgart yang akan memutuskan apakah pengadilan untuk para tersangka akan dilanjutkan. ● tom

## Myanmar Jadi Negara Penghasil Opium Terbesar di Dunia

**BANGKOK (IM)** - Myanmar telah menjadi sumber opium terbesar di dunia, akibat ketidakstabilan dalam negeri dan penurunan budidaya di Afghanistan, kata PBB dalam sebuah laporan pada Selasa, (12/12).

Menurut Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), penurunan budidaya opium sebesar 95% di Afghanistan setelah larangan narkoba oleh Taliban pada 2022 telah menyebabkan pasokan global beralih ke Myanmar, di mana ketidakstabilan politik, sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh kudeta pada 2021 mendorong banyak orang untuk bertani opium.

Petani Myanmar kini memperoleh penghasilan sekira 75% lebih banyak dari pertanian opium poppy, karena harga rata-rata bunga opium telah mencapai sekira

USD355 per kilogram dan area budidaya telah meningkat sebesar 18% dari tahun ke tahun, dari 40,100 menjadi 47,000 hektar, sehingga meningkatkan potensi hasil panennya. tingkat tertinggi sejak 2001, kata UNODC.

"Gangguan ekonomi, keamanan, dan pemerintahan yang terjadi setelah pengambilalihan kekuasaan oleh militer pada Februari 2021 terus mendorong para petani di daerah terpencil untuk mencari opium untuk mencari nafkah," kata Perwakilan Regional UNODC Jeremy Douglas sebagaimana dilansir Reuters.

Kawasan budidaya opium berkembang paling luas di wilayah perbatasan Myanmar di Negara Bagian Shan bagian utara, diikuti oleh negara bagian Chin dan Kachin, karena hasil panen meningkat sebesar

16% menjadi 22,9 kilogram per hektar karena praktik pertanian yang lebih canggih, demikian laporan UNODC.

Meningkatnya pertempuran antara militer Myanmar dan kelompok etnis minoritas bersenjata kemungkinan besar akan mempercepat perluasan penanaman opium, kata Douglas.

Junta Myanmar tidak menanggapi permintaan komentar Reuters.

Perluasan penanaman opium berdampak pada pertumbuhan ekonomi gelap di Myanmar yang mencakup tingginya tingkat produksi dan perdagangan obat-obatan sintesis serta perusahaan kriminal lainnya mulai dari pencucian uang hingga pusat penipuan online yang dijalankan oleh kejahatan terorganisir. ● ans



### HUAWEI BERIKAN BEASISWA KEPADA SISWA BERBAKAT BULGARIA

Raksasa teknologi Tiongkok Huawei pada Selasa (12/12) memberikan sertifikat kepada 18 siswa atas partisipasi mereka dalam program pelatihan global "Benih untuk Masa Depan" Huawei, dan 2 siswa teratas mendapat kesempatan untuk pergi ke Tiongkok selama seminggu pada Januari 2024. Perusahaan juga memberikan beasiswa kepada 50 siswa Bulgaria berprestasi masing-masing sebesar 2.000 euro (2.151 dolar AS).

## 23 Orang Tewas Akibat Serangan Bom Bunuh Diri di Pakistan

**PAKISTAN(IM)** - Setidaknya 23 tentara yang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangan kelompok militan taliban ke markas militer Pakistan di provinsi Khyber Pakhtunkhwa, dekat perbatasan Afghanistan pada Selasa (12/13).

Melansir BBC News, beberapa anggota militan tersebut sebelumnya memang, berusaha untuk memasuki kompleks militer di distrik Dera Ismail Khan, namun upaya tersebut berhasil digagalkan.

Tanpa diduga, kelompok militan itu malah menggunakan truk bermuatan bahan peledak, untuk menabrak tembok pembatas di markas tentara tersebut.

Penyerangan tersebut juga disusul dengan serangan bom bunuh diri yang menyebabkan bangunan itu runtuh.

Walhasil, serangan tersebut membuat banyak tentara yang sedang tidur meninggal serta puluhan tentara lainnya terluka.

Total ada 27 orang militan yang tewas, setelah tentara Pakistan melaku-

kan operasi militer di wilayah tersebut hanya dalam waktu semalam.

Kelompok Tahreek-e-Jihad Pakistan (TJP) pun mengaku, salah seorang anggotanya yang telah melakukan penyerangan tersebut.

Memang, sejumlah serangan yang dilakukan oleh kelompok militan di Pakistan mengalami peningkatan, sejak kelompok militan Islam garis keras Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) menarik diri dari gencatan senjata pada tahun lalu.

Kelompok Taliban Pakistan tersebut pun, telah memerangi angkatan bersenjata dan polisi di Pakistan selama bertahun-tahun. Sebelumnya, ada juga sekitar 100 orang tewas dalam ledakan bom yang diduga sebagai tindakan teroris di sebuah masjid kota Peshawar pada Januari lalu.

Kendati demikian, TTP membantah jika pihaknya yang melakukan aksi tersebut dan malah menyalahkan komandan faksi karena telah memisahkan diri. ● tom

## Perdana Menteri Baru Polandia Janji Galang Dukungan Eropa untuk Ukraina

**WARSAWA(IM)** - Perdana Menteri Polandia yang baru, Donald Tusk, mengatakan dalam pidato pengukuhannya di parlemen Warsawa, Rabu (13/12), bahwa pemerintahan barunya akan mendorong Barat meningkatkan dukungan kepada Ukraina dalam perang melawan Rusia.

"Kami akan menuntut mobilisasi penuh Barat guna membantu Ukraina. Saya tak bisa lagi mendengarkan politisi yang berbicara jenuh kepada situasi di Ukraina," kata dia.

Tusk akan menjadi perdana menteri pada Rabu ketika pemerintahannya dilantik oleh presiden. Ketika sebagian besar dunia kini fokus pada konflik Gaza, suara-suara di AS dan Hungaria mulai membahas soal pengurangan dukungan untuk Ukraina.

Tusk, yang memimpin Dewan Eropa pada 2014-2019, melakukan perjalanan ke Brussels pekan ini guna menghadiri pertemuan puncak para pemimpin Uni Eropa. "Dalam beberapa jam lagi, saya akan berangkat ke Brussels, dengan harapan

kita bisa meyakinkan sekutu-sekutu kita agar membela nilai-nilai demokrasi dan Ukraina melawan agresi Rusia," tambah Tusk.

Hanya Barat yang bersatu yang bisa membantu Ukraina menang dalam perjuangannya menegakkan nilai-nilai demokrasi. Kebetulan yang aneh, politisi-politisi yang menyerang fondasi demokrasi adalah politisi anti-Ukraina.

"Kita harus ingat tentang apa perang itu. Bahwa rakyat Ukraina sedang memperjuangkan sesuatu yang sangat penting, bahwa perjuangan mereka dimulai di Maidan, bahwa mereka berjuang agar bisa bergabung dengan komunitas dunia Barat," sambung dia.

"Pertolongan Polandia untuk Ukraina sangat penting, namun pada saat yang sama kita harus tetap tegas ketika menyangkut kepentingan, antara lain, para petani Polandia," kata Tusk mengacu larangan impor gandum Ukraina yang diterapkan pemerintah Polandia. ● tom